

ABSTRAKSI

Sejak pencabutan pemberlakuan Dekrit Darurat pada tahun 1987, berarti membuka pintu bagi demokratisasi di Taiwan. Pemilihan umum sebagai tonggak yang penting dalam pemerintahan pun telah diselenggarakan secara teratur, partai politik sudah semakin matang dan rakyat juga aktif berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan yang telah diselenggarakan. Sekarang rakyat Taiwan mempunyai kontrol lebih besar atas urusan-urusan baik internal maupun eksternal negara dibandingkan sebelumnya. Reformasi telah membawa kemajuan penting bagi demokrasi di Taiwan sepanjang akhir dekade ini. Langkah-langkah tersebut merupakan awal bagi terbukanya pintu bagi liberalisasi serta proses politik, masing-masing pemilihan telah membawa politik Taiwan semakin dekat kepada tujuan demokrasi seutuhnya. Akhirnya, pada tanggal 23 Maret 1996, untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Taiwan, pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan di Taiwan.

Pada tanggal 18 Maret tahun 2000, 82,7 persen dari seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk memilih presiden yang baru. Kompetisi yang ketat antara tiga besar pasangan kandidat akhirnya berakhir dengan kemenangan pasangan Chen Shui-bian dan Annette Lu. Calon dari DPP tersebut terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sekaligus mengakhiri era 50 tahun kejayaan KMT. Empat tahun kemudian, pada tanggal 20 Maret 2004, sebanyak 80,28 persen dari pemilih keseluruhan menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan presiden Taiwan langsung ketiga kalinya. Kandidat DPP, Chen Shui-bian dan pasangannya Annette Lu, menghadapi lawan yang sama seperti empat tahun lalu, Lien Chan, Ketua KMT dan James Soong, yang kali ini sepakat untuk berkoalisi. Setelah melalui proses pemilihan yang cukup ketat dan menegangkan, Chen akhirnya terpilih kembali dengan selisih yang sangat tipis yakni 0,23 persen suara.

Pada hari yang sama, untuk pertama kalinya, sebuah referendum nasional yang dikenal dengan sebutan Referendum Damai menyangkut hubungan Taiwan – Cina, akhirnya digelar di Taiwan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan presiden. Tapi disayangkan hasil akhir referendum dianggap tidak sah berdasarkan fakta bahwa ternyata suara yang masuk kurang dari 50 persen dari keseluruhan jumlah pemilih. Sekalipun demikian, keputusan untuk melaksanakan sebuah referendum tersebut telah memainkan peranan penting terhadap hasil akhir pemilu. Oleh karena itu, daripada melihat hasil akhir referendum yang tidak sah lebih baik hal ini dijadikan pelajaran berharga bahwa ini merupakan langkah penting realisasi nilai demokrasi di Taiwan. Penentuan pendapat secara umum yang dicerminkan oleh referendum akan membawa arti besar bagi

ABSTRACT

Since the lifting of martial law in 1987, Taiwan has moved rapidly toward full democracy. Elections for important posts in the government are held regularly, political parties have matured, and people actively participated in elections. The people of Taiwan now have greater control over affair of state than ever before. Democratic reforms in Taiwan have made significant progress during the last decade. Ever since the first steps were taken to liberalize and expand the political process, each election has carried Taiwan politics closer to the goal of full democracy. On March 23, 1996, Taiwan held its first direct presidential election.

On March 18, 2000, 82.7 percent of all eligible voters went to the polls to elect the new president of the Republic of China. The heated competition among the top three teams was quite dramatic. DPP candidate Chen Shui-bian and his running mate Lu Hsiu-lien (Annette Lu) won the election, ending the Kuomintang's 50 year hold on the presidency in Taiwan. Four years later, on March 20, 2004, 80.3 percent of voters went to cast their ballots for the third time to elect their national leaders. Chen and Lu sought reelection, facing the same challengers as four years earlier, Lien Chan of the KMT and Soong Chu-yu (James Soong) of the PFP which ran on a joint ticket. After a heated election race, Chen was re-elected by a narrow margin of less than 0.25 percent of valid of votes.

On the same day, Taiwan's first ever national referendum, known as Peace Referendum regarding relations with the People's Republic of China, was held along with the presidential election. But it was disappointing that the result of referendum declared null and void due to the fact that less than the required 50 percent of all eligible voters in Taiwan voted in the referendum. Nevertheless, the decision to hold a referendum played in the outcome of the past presidential election. Regardless of the result of the referendum, the promotion of the referendum has already achieved the goal of deepening Taiwan's democracy. The trend in popular opinion reflected by the referendum vote will carry great significance for the formulation and execution of future